

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian zakat

Dalam Muhammad (2008) dijelaskan bahwa menurut bahasa, zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.

Adapun menurut Mahmud (2010) zakat artinya bersih dan berkembang karena zakat membersihkan muzzaki dari dosa dan mengembangkan pahalanya di samping zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi. Sedangkan dalam Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, walaupun rumusan dan definisinya berbeda tetapi esensinya sama yaitu mengeluarkan sejumlah harta yang kemudian akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam, dan islam terbangun di atas lima rukun islam tersebut (Muhammad,2008). Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, “Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhandan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram”.(HR. Bukhari)

Fakhruddin (2008) juga menjelaskan bahwa zakat dimulai pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Jadi terlebih dahulu diwajibkan zakat fitrah baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan. Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’.

1. Al-Qur’an

Dalil-dalil yang mensyariatkan zakat sangat banyak, perintah mengeluarkan zakat dalam Al-Qur’an disebutkan di 33 tempat (10 tempat di awal ayat dan 23 tempat disebut dalam rangkaian ayat) (Mahmud, 2010), sedangkan Abduh (2014) perintah zakat disebut berulang hingga 32 kali.

Adapun beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menunjukkan atas wajibnya zakat, diantaranya adalah:

a) Al-Baqarah: 43

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Al-Baqarah: 43).

b) At-Taubah: 130

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 130).

2. Hadis

Selain rujukan dari Al-qur‘an, penjelasan mengenai zakat juga dijelaskan dari sabda-sabda Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Anas bahwa salah seorang laki-laki dari suku Tamim datang menemui Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam dan berkata, “Ya Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu. Cobalah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah?” lalu Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda,

“Keluarkanlah zakat dari hartamu karena itu merupakan penyuci yang akan membersihkan kamu menyambung tali silaturahmi dengan kaum keluargamu dan mengakui hak pengemis, tetangga dan orang-orang miskin”. (HR. Muslim)

3. Ijma' Ulama

Sedangkan secara *ijma'*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya (Fakhruddin, 2008).

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian dan Tujuan Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Pola Pengelolaan Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Penyaluran zakat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik tanpa disertai adanya target, kemandirian sosial, maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana zakat yang diterima mustahik digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang disertai dengan adanya target untuk merubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

3. Lembaga Amil Zakat

a. Lembaga Amil di Indonesia

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat untuk memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat (Ar-Rahman, 2000).

Di Indonesia, LAZ berbeda dengan BAZ. LAZ atau Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inisiatif masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Menurut data FOZ, ada 19 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia yang resmi dikukuhkan di tingkat pusat, terdiri dari 1

BAZNAS yang dimiliki pemerintah dan 18 LAZ yang dikelola swastadi antaranya:

Tabel 2.1
Nama 18 LAZNAS

No	Nama Laznas
1	Dompot Dhuafa Republika (DDR)
2	Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
3	Amanah Takaful
4	Baitul Maal Muamalat
5	Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDS Al-Falah)
6	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
7	Pusat Zakat Umat Persatuan Umat (PZPU)
8	Baitul Maal Umat Islam BNI (BAMUIS BNI)
9	Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)
10	Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII)
11	Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI)
12	Baituz Zakat Pertamina
13	Rumah Zakat Indonesia (RZI)
14	Dompot Peduli Umat Darul Tauhid (DPU DT)
15	LAZ Muhammadiyah (LAZ MU)
16	LAZ Nahdatul Ulama (LAZ NU)
17	LAZ Baitul Maal wa Tamwil (LAZ BMT)
18	LAZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZ IPHI)

Sumber : Forumzakat

Hanya LAZ yang dikukuhkan pemerintah saja yang bukti setoran zakatnya diakui sebagai pengurang pajak dari muzakki yang telah membayarkan kewajibannya. Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah

yayasan karena LAZ termasuk organisasi nirlaba yang dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk menumpuk laba.

Setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002) :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Salah satu tugas penting dari lembaga Amil Zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya (Hafidhuddin, 2002).

Lembaga Amil Zakat memiliki fungsi yang optimal sebagai pengelola zakat di Indonesia dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Karena, yang menjadi tujuan awal usaha lembaga amil zakat adalah pengelolaan dan pendistribusian. Pengelolaan dalam arti mengusahakan agar dana zakat yang berhasil di himpun dapat di salurkan ke post-post (asnaf zakat) yang sesuai dengan yang di anjurkan

dan di tetapkan oleh syariat islam. Sedangkan pendistribusian termasuk juga pendayagunaan.

Lembaga amil zakat harus mampu merancang program yang sifat nya pendayagunaan agar dana zakat yang akan di salurkan kepada asnaf tidak habis sia-sia dan lebih produktif. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa lembaga amil zakat memiliki peran strategis untuk meningkatkan ekonomi.

4. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (Departemen Pendidikan Nasioanl, 2012). Efisiensi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan input dalam porsi seminimum mungkin, sehingga efisiensi merupakan tingkat input dibagi dengan tingkat outputnya.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output (keluaran) dan atau input (masukan) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu input yang digunakan. Menurut Muhaaram dan Pusvitasi (2007) Secara sederhana efisiensi terdiri dari dua komponen, yaitu:

1. Efisiensi Teknis

Mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dengan input yang ada, efisien secara teknis bukan berarti efisien secara harga/alokatif.

2. Efisiensi Alokatif/Harga

Menggambarkan kemampuan untuk menggunakan input dalam proporsi yang juga memasukkan perhitungan biaya. DMU dianggap efisien alokatif bila mampu menghasilkan output dengan biaya seminimal mungkin.

Efisiensi selalu dihubungkan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan indikator dari rasio antara nilai tambah (value added) dan nilai output. Ini berarti, semakin tinggi nilai rasio tersebut maka semakin tinggi pula tingkat efisiensinya (Gafur, 2007)

Efisiensi mengacu pada hubungan antara output dan input sehingga efisiensi diartikan sebagai rasio antara output dan input. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu (Gafur, 2007) :

- a. Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
- b. Dengan input kecil dapat menghasilkan output yang sama.
- c. Dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.

3. Prinsip-Prinsip Efisiensi

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi atau lembaga itu termasuk efisien atau tidak, maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi (Gafur, 2007), yaitu sebagai berikut:

a. Efisiensi harus dapat diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal, untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak.

b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional

Rasional artinya segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis, bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin. Subjektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.

c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas/mutu

Kuantitas boleh saja ditinggalkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas. Jangan sampai hasil ditingkatkan tetapi kualitasnya rendah.

d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Pelaksanaan operasional dapat diusahakan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam menggunakan sumber daya yang ada.

e. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga yang bersangkutan.

Ini berarti bahwa penerapannya disesuaikan dengan kemampuan SDM, dana, fasilitas, dan lain-lain, yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan sambil diusahakan peningkatannya. Setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta memiliki kemampuan yang tidak selalu sama.

f. Efisiensi itu ada tingkatannya

Secara sederhana dapat ditentukan penggolongan tingkatan efisiensi, misalnya tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal). Tingkatan efisiensi juga dapat menggunakan angka presentase.

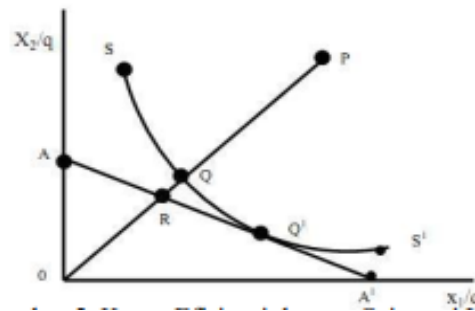
5. Cara Mengukur Efisiensi

Pengukuran efisiensi sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu lembaga, pengukuran efisiensi menurut Coelli dalam Akbar (2009) dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

a. *Input Oriented Measure*

Pengukuran berorientasi input adalah dengan cara menghitung berbagai input yang dapat dikurangi tanpa mengubah jumlah output

yang dihasilkan. Dalam penjelasannya, Farrell memberikan contoh perusahaan yang memproduksi output Y dengan dua input yakni X_1 dan X_2 dengan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS).



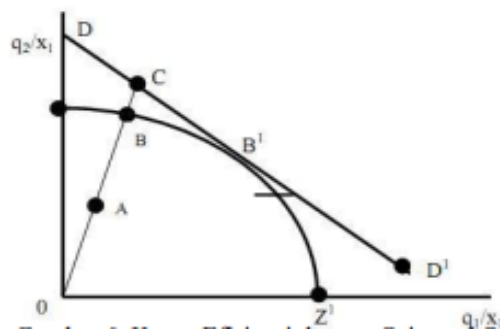
Gambar 2.1. Kurva Efisiensi dengan orientasi Input

Garis OP menjelaskan kombinasi input yang digunakan oleh suatu perusahaan. Garis isocost AA' menggambarkan kombinasi input yang dapat digunakan oleh produsen dalam tingkat biaya yang sama (efisiensi alokatif), sedangkan garis *isoquant* yang ditunjukkan dengan kurva SS' menggambarkan kombinasi input untuk menghasilkan output yang sama (efisiensi teknis). Titik Q' menunjukkan tingkat efisien secara teknis dan alokatif. Titik P menunjukkan inefisiensi karena tidak berada pada kurva *isocost* dan *isoquant*. Titik R menunjukkan efisiensi alokatif dan Q efisiensi teknis.

b. Oriented Measure

Pengukuran dengan pendekatan orientasi output adalah dengan cara menghitung berbagai output yang dapat ditingkatkan tanpa mengubah jumlah input yang dihasilkan. Dalam penjelasannya, Farrell memberikan contoh perusahaan yang

memproduksi dua output yakni Q_1 dan Q_2 dengan sebuah input X . Asumsi yang digunakan adalah *Constant Return to Scale* (CRS), sehingga didapat Kurva Kemungkinan Produksi atau *Production Possibility Curve* yang ditunjukkan dengan garis ZZ' yang merepresentasikan batas atas dari kemungkinan produksi. Sehingga titik A menunjukkan inefisiensi secara teknis karena masih bisa mengoptimalkan output yang masih berada di bawah garis *Production Possibility Curve* ke titik B. Berikut Kurva efisiensi dengan orientasi Output



Gambar 2.2. Kurva Efisiensi dengan Orientasi Output

Titik B yang berada pada *Production Possibility Curve* menunjukkan *technical efficiency*. Sedangkan titik C yang berada pada garis *isorevenue* DD' menunjukkan *technical efficiency*. Titik B' menunjukkan tingkat efisien secara teknis dan alokatif yang merupakan tingkatan paling ideal. Sehingga didapat *Overall Revenue Efficiency* dengan memperhitungkan dua persamaan di atas.

Sedangkan menurut Muharam,dkk (2007), pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan rasio

Pendekatan rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Pendekatan rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi jumlah output yang optimal dengan menggunakan input yang seminimal mungkin. Chu-Fen Li melihat pendekatan rasio sebagai "the most critical limitation of the financial ratio is that they fail to consider the multiple input-output..." (Chu-Fen Li, 2007). Oleh karena itu pendekatan ini belum mampu menilai kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh.

2. Pendekatan Regresi

Pendekatan ini mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat input tertentu. Dimana Y adalah output dan X adalah input. Penghitungan regresi ini tidak dapat mengakomodir jumlah variabel output yang banyak.

3. Pendekatan Frontier

Pendekatan frontier dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis, yakni pendekatan frontier parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik diukur menggunakan tes statistik parametrik seperti *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach*

(DFA), sedangkan pendekatan frontier nonparametrik diukur dengan menggunakan tes statistik nonparametrik yakni dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Tes parametrik merupakan tes yang modelnya mensyaratkan asumsi khusus tentang distribusi populasi harus normal, sedangkan tes statistik nonparametrik merupakan tes yang modelnya tidak mensyaratkan distribusi khusus pada distribusi data (Coelli, 1996). Sehingga untuk menganalisis pengukuran dengan variabel yang ada, penelitian ini menggunakan metode nonparametrik DEA.

6. Pengukuran Efisiensi Pada Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan salah satu jenis dari organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada pencarian laba melainkan sebuah wadah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Bagi para stakeholder organisasi nirlaba seperti lembaga amil zakat, pengukuran efisiensi erat sekali dengan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi atas akuntabilitas internal dan eksternal organisasi tersebut. Kinerja pada dasarnya adalah sebuah konsep multidimensi yang dapat berupa waktu, kualitas, inovasi, efisiensi, efektivitas, atau dimensi lain.

Meskipun OPZ berdasarkan sosial, Lembaga Zakat (OPZ) perlu menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemennya. Termasuk dalam istilah ini, OPZ perlu

beroperasi efektif dan efisien. Baru-baru ini, dalam pengukuran manajemen zakat, Baznas and Indonesian Bank memulai konsep prinsip Inti Zakat (Beik et al, 2014).

Dalam sebuah efisiensi, Pengukuran kinerja akan memberikan pijakan bagi manajemen untuk mengendalikan jalannya lembaga secara efektif. Bila sebuah lembaga menjalankan aktivitas tanpa melakukan pengukuran terhadap kinerja, maka lembaga tersebut tidak dapat melakukan perbaikan, meningkatkan pelayanannya, melakukan efisiensi, ataupun memberikan perlakuan yang tepat kepada karyawannya (Gozali, 2005)

Ukuran-ukuran efisiensi (kinerja) organisasi nirlaba seperti LAZ dapat berupa (Joelani, 1994) :

1. Benefit, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang Dilekatkan pada jasa organisasi. Penilaian keuangan dari benefit mencakup dua komponen yaitu, pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat (dalam lembaga amil zakat yang dimaksud masyarakat adalah mustahik).
2. Outcome, menyatakan ukuran non-keuangan dari manfaat sosial yang diberikan organisasi. Contohnya jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
3. Output, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah output tersebut mengarahkan

organisasi pada outcome yang diharapkan. Contohnya jumlah mustahik yang diberdayakan.

4. Input, menunjukkan ukuran non-keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan organisasi.
5. Cost, menunjukkan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan pelayanan jasanya.

7. Data Envelopment Analysis

a. Definisi Data Development Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan suatu metode pengukur efisiensi yang menggunakan teknik pemrograman matematis. DEA mengukur efisiensi relatif dari kumpulan *decision making unit* (DMU) dalam mengelola input dengan jenis yang sama sehingga menghasilkan output dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui (Siswandi,2004). DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi antara lain dalam hal untuk penelitian kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), transportasi, pabrik (*manufacturing*), maupun perbankan (Insukindro dalam Wahyuny).

b. Kelebihan dan Kekurangan *Data Envelopment Analysis*

Dari berbagai metode perhitungan efisiensi yang ada pada DEA, Akbar (2009) mengemukakan bahwa DEA memiliki kelebihan

dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan dari metode DEA menurut Akbar, antara lain:

- 1) DEA dapat mengukur efisiensi berbagai DMU sejenis secara relatif yang memiliki banyak input dan output.
- 2) Untuk mengukur efisiensi tidak perlu mencari asumsi bentuk hubungan antar variabel input dan output dari DMU sejenis.
- 3) DMU langsung dibandingkan dengan yang sejenis.
- 4) Faktor input dan output dapat memiliki satuan ukuran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, output 1 (x_1) berupa jumlah jiwa yang diselamatkan dan input (x_2) dapat berupa jumlah nilai uang. Pengukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari variabel-variabel yang ada.

Kekurangan yang perlu diperhatikan dari metode DEA menurut Akbar, antara lain:

- 1) Teknik perhitungan yang digunakan dalam DEA adalah *extremepoint technique*, sehingga kesalahan pengukuran dapat berakibat signifikan.
- 2) DEA hanya mengukur efisiensi relatif yang dilihat dari DMU, yakni menunjukkan perbandingan baik dan buruk dari sebuah DMU dibanding dengan DMU sejenis. DEA tidak mengukur efisiensi secara absolut.
- 3) DEA menggunakan teknik nonparametrik, sehingga uji

hipotesis secara sistemik tidak mudah untuk dilakukan.

- 4) Karena setiap DMU menggunakan rumusan *linier programming* yang terpisah, maka perhitungan secara manual sangat rumit dan lama. Namun hal ini dapat di atasi dengan adanya *software*.

c. Pendekatan Pengukuran Efisiensi dengan *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Pengukuran efisiensi pada lembaga keuangan, termasuk lembaga nirlaba mempunyai banyak pendekatan, pendekatan yang digunakan menurut penelitian Hadad dalam Akbar(2009) tentang industri perbankan, antara lain:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menganggap institusi keuangan sebagai produsen dari simpanan dan kredit pinjaman. Input dalam hal ini adalah jumlah tenaga kerja, asset tetap, dan material lainnya. Selain input, terdapat pula output yang dalam hal ini adalah jumlah simpanan, pinjaman, serta transaksi terkait.

2) Pendekatan Intermediasi

Pendekatan ini menganggap lembaga keuangan sebagai lembaga perantara dalam jasa keuangan, yang mengubah dan menyalurkan aset-aset keuangan dari unit-unit surplus kepada unit-unit defisit. Dalam hal ini, input-input yang digunakan adalah biaya tenaga kerja, modal, dan pembayaran bunga

deposito. Output yang diukur adalah kredit pinjaman dan investasi keuangan.

3) Pendekatan Asset

Pendekatan ini melihat institusi keuangan sebagai lembaga penyalur kredit pinjaman yang outputnya diukur dengan aset-aset yang dimiliki lembaga tersebut (Akbar, 2009). Dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi. Kedua pendekatan dilakukan agar dapat mengetahui efisiensi Organisasi Pengelola Zakat yang bertugas sebagai produsen yang melahirkan dua produk utama (dana terhimpun dan dana tersalurkan) dan lembaga perantara dalam jasa keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentang pengukuran efisiensi lembaga zakat yang dilakukan oleh Akbar (2009), bertujuan untuk menentukan tingkat efisiensi Zakat Lembaga di Indonesia menggunakan DEA dengan pendekatan produksi. Metode ini mengukur rasio antara output dan input, yang dibandingkan antara OPZ. Variabel output yang digunakan adalah pengumpulan dana zakat dan distribusi dana zakat, sedangkan variabel input adalah personil biaya, biaya sosialisasi dan biaya operasional lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik daripada tahun 2006 dan 2007, keduanya

teknis (94,52%), skala (75%), dan secara keseluruhan (71,27%). Perhitungan 9 OPZ tahun 2007 dengan asumsi CRS, hanya menunjukkan 2 OPZ yang efisien, yaitu, BMM dan Bamuis BNI. Penyebab utama inefisiensi adalah dana distribusi dan pengumpulan dana, yang memberikan kontribusi 43,1% dan 36%. Sedangkan input-berorientasi menyatakan bahwa sumber ketidakefisienan adalah biaya operasional lainnya (34,9%) dan biaya sosialisasi (31,1%).

Di samping Rahmayanti (2014) menganalisis efisiensi dari tiga Lembaga Amil Zakat di Indonesia yaitu PKPU, Rumah Zakat dan Bamuis BNI pada periode 2009-2011. Variabel input yang digunakan yaitu jumlah dana zakat yang dihimpun, biaya operasional dan gaji karyawan. Sedangkan variabel output yang diteliti terdiri dari jumlah dana zakat yang disalurkan, aktiva tetap dan aktiva lancar. Hasil dari studi ini menunjukkan pada tahun 2009-2011 rata-rata tingkat efisiensi PKPU dan Bamuis BNI sudah mencapai 100 persen.

Kemudian di perkuat oleh penelitian Rusydiana et al (2016). Rusydiana et altry untuk mengukur efisiensi 3 (tiga) Lembaga Zakat (Baznas, PKPU dan Rumah Zakat) dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasilnya menunjukkan bahwa ada 12 DMU yang sangat efisien (100% efisien). Hanya 6 DMU yang tidak efisien. Utama faktor inefisiensi Lembaga Zakat sejak 2007 hingga 2014 karena distribusi dana zakat ke ashnaf. Itu masih kurang optimal.

Selain itu Norazlina dan Abdul (2011), juga meneliti dalam kerangka mereka untuk menganalisis efisiensi dan tata kelola lembaga zakat dengan menggunakan DEA. Mereka berpendapat bahwa karakteristik DEA cocok untuk aplikasi ke lembaga zakat, karena itu berhasil diterapkan sebagai indikator untuk efisiensi sektor nirlaba dan publik.

Selanjutnya, Norazlina dan Abdul (2012) mengukur pertumbuhan produktifitas lembaga zakat dengan menggunakan variabel return to scale (VRS) dan mereka menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat beroperasi di non-CRS (Constant Return Scale) Dengan demikian, lembaga zakat perlu meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Adapun Wahab, dkk. (2006) telah meneliti tingkat efisiensi zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi zakat di Malaysia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Malmquist Productivity Index and Technical Efficiency. Variabel input yang diteliti adalah jumlah karyawan dan jumlah pengeluaran. Sementara variabel output yang digunakan dalam studi ini adalah jumlah dana zakat yang dihimpun, jumlah dana zakat yang didistribusikan dan jumlah pembayar zakat (amilin). Hasil dari studi ini menilai rata-rata sebesar 80,6 persen lembaga amil zakat di Malaysia memiliki efisiensi teknis.

Hasil studi dengan model BCC yang diteliti Aini (2012) dengan asumsi VRS (*Variabel Return to Scale*) menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi ketiga Lembaga Amil Zakat Nasional mengalami kenaikan dari tahun 2008-2009. Dipandang dari segi input dan output pada tahun 2008, ketiga LAZNAS, PKPU dan Rumah Zakat, mencapai nilai efisien yang maksimal, sedangkan YDSF mengalami inefisiensi.

Wulandari, 2014 Perhitungan efisiensi dengan menggunakan orientasi *output* model CRS (*Constant Return to Scale*) dan VRS (*Variabel Return to Scale*) dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produksi dengan variabel input dan variabel *output*. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi skala tertinggi ada pada YBUI BNI sebesar 81 persen, Rumah Zakat 76 persen, Lazis Swadaya Ummah sebesar 74 persen dan Dompot Dhuafa 74 persen.

Kadry (2014) meneliti dengan judul Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi kasus : Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI pada tahun 2010-2012) dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. dengan Variabel Input terdiri dari Total aset, Biaya perjalanan dinas. Sedangkan Variabel Outputnya terdiri Mustahik, penerimaan zakat dan penyaluran Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi

skala tertinggi di miliki oleh YBUI BNI sebesar 81% lalu rumah zakat 76%, LAZIS Swadaya Ummah 74% dan Dompot Dhuafa sebesar 74%.

Lestari (2015) meneliti dengan judul Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Variabel input terdiri dari Dana yang terhimpun, Aktiva Tetap, Gaji Karyawan. Sedangkan Variabel Outputnya Dana yang di salurkan dan biaya operasional Menunjukkan bahwa BAZDA kabupaten Lombok Timur mengalami efisiensi pada tahun 2012-2014 yaitu sebesar 100 persen. Efisiensi terjadi karena nilai actual sama dengan nilai target yang ditetapkan oleh DEA.

Parisi (2017) meneliti dengan judul Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA) Malmquist Productivity Index*. Variabel Input: Total Aset, biaya Promosi dan dokumentasi, Biaya Perjalanan dinas. Variabel Output: Penerimaan dan penyaluran zakat. Hasil penelitian ini Terdapat 5 unit pengambil keputusan (DMU) yang efisien sempurna (100%) dan yang inefisien sebanyak 22 DMU, terdiri dari 10 DMU (kondisi IRS) dan 12 DMU (Kondisi DRS), OPZ yang paling tidak efisien adalah DD (2010) sebesar 9,63% tingkat efisiennya.

C. Hipotesis Penelitian

Dari beberapa penjelasan dan Penelitian di atas maka dapat di buat hipotesis yaitu :

1. Dompot Dhuafa yang sudah efisien dalam Kinerjanya memiliki

Skor = 1

Dompot Dhuafa di katakan sudah efisien apabila hubungan antara input dan output menghasilkan nilai 100 persen atau sama dengan 1.

2. Dompot Dhuafa yang belum efisien dalam kinerjanya memiliki skor <1 .

Jika nilai hasil dari hubungan antara input dan output tersebut menurun dan mendekati angka 0, maka kinerja Dompot Dhuafa dinyatakan tidak efisien.

3. Rumah Zakat yang sudah efisien dalam kinerjanya memiliki skor = 1

Rumah Zakat di katakan sudah efisien apabila hubungan antara input dan output menghasilkan nilai 100 persen atau sama dengan 1.

4. Rumah Zakat yang belum efisien dalam kinerjanya memiliki skor <1 .

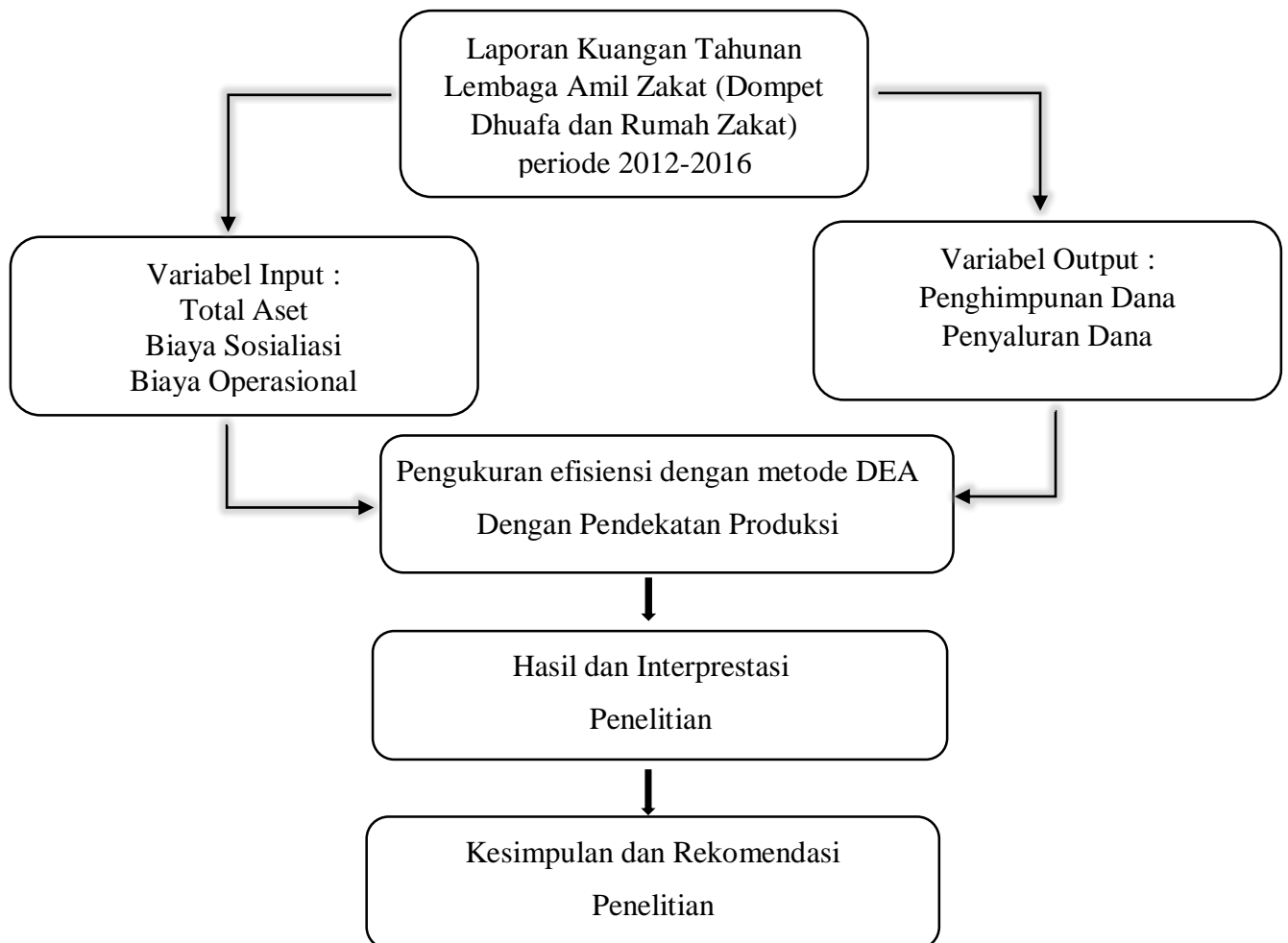
Jika nilai hasil dari hubungan antara input dan output tersebut menurun dan mendekati angka 0, maka kinerja Rumah Zakat dinyatakan tidak efisien.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi Lembaga Amil zakat (Dompot Dhuafa dan

LAZISMU) kota Yogyakarta periode 2015-2017. dalam Pengukuran tingkat efisiensi ini terlebih dahulu peneliti menentukan jenis variabel input dan output.

Penelitian ini akan mengukur efisiensi dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Analisis ini kemudian akan menghasilkan perumusan *frontier* interaksi antara input dalam mempengaruhi output yang dihasilkan. Hubungan antara input dan output tersebut yang kemudian akan menentukan nilai efisiensi.



Sumber : Analisis Penulis

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir